

**KESIAPAN FINANSIAL DAN KAPASITAS KEWIRAUSAHAAN
MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI MASTERPLAN DESA
WISATA**

Mukhibatul Hikmah

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Mulawarman
mukhi@fisip.unmul.ac.id

Albiruni Amaliano

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Mulawarman
amaliantoa@gmail.com

Adietya Arie Hetami

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Mulawarman
adietyaarie@fisip.unmul.ac.id

Endrik Andika

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Mulawarman
endrikandika@fisip.unmul.ac.id

ABSTRACT

The development of community-based tourism requires adequate preparedness of local communities in financial capacity, entrepreneurial skills, and institutional support; however, many rural areas continue to face limitations in these aspects. This study aims to analyze the readiness of the Desa Mata Air in supporting the implementation of the Village Tourism Masterplan by examining their financial conditions, entrepreneurial capacity, and the role of village institutions. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis. The findings indicate that while the community demonstrates initial financial independence through the use of personal and family funds, their financial literacy, bookkeeping practices, and access to formal financing remain limited. In terms of entrepreneurship, the community exhibits strong motivation and initiative, yet their technical skills, managerial competence, and business experience are still low due to minimal training and mentoring. Institutional support is also suboptimal; training programs provided by the village government are not continuous, and the Village-Owned Enterprise (BUMDes) has not yet fulfilled its strategic role in financing and assisting local micro-enterprises. These results suggest that community readiness remains partial, strong in motivation but weak in technical and financial capabilities. The study implies the need for strengthening financial literacy, expanding locally relevant entrepreneurial training, developing accessible micro-

financing schemes, and optimizing the role of BUMDes to support sustainable community-based tourism development.

Keywords: *Financial Readiness, Entrepreneurial Capacity, Village-Owned Enterprise (Bumdes), Community-Based Tourism (CBT), Tourism Village.*

A. PENDAHULUAN

Pariwisata telah menjadi salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Pariwisata kini menjadi sektor yang mampu berperan dalam menyediakan kesempatan kerja, menggerakkan perekonomian masyarakat, dan menjaga kekayaan budaya, sehingga berfungsi sebagai sarana penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Saleh, 2018). Melihat peran strategis tersebut, pengembangan pariwisata saat ini tidak hanya difokuskan pada skala kota atau nasional, tetapi juga mulai diarahkan pada level pedesaan agar manfaat ekonomi dapat tersebar lebih merata. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pengembangan desa wisata yang memungkinkan masyarakat lokal terlibat langsung dalam mengelola potensi alam, budaya, dan ekonomi yang dimiliki desa. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *Community-Based Tourism* (CBT) yang menempatkan masyarakat sebagai pusat dari seluruh proses pengembangan, mulai dari perencanaan, pengelolaan, hingga pemanfaatan hasilnya (Scheyvens, 1999). Pada konsep CBT, masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai objek, tetapi sebagai subjek yang memiliki kendali atas bagaimana potensi wisata dikembangkan dan dikelola. Posisi strategis tersebut menuntut adanya kapasitas yang memadai pada masyarakat agar mereka mampu menjalankan peran tersebut secara efektif. Dengan landasan itulah kemudian dipahami bahwa keberhasilan implementasi CBT sangat bergantung pada kemampuan masyarakat.

Kemampuan masyarakat yang dimaksud mencakup tiga aspek utama yang menjadi fondasi dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas. Aspek pertama adalah kesiapan finansial masyarakat, yang berkaitan dengan kemampuan menyediakan modal usaha, mengelola keuangan secara efektif, serta mengakses sumber pembiayaan yang mendukung pengembangan kegiatan ekonomi berbasis wisata (Suansri, 2003). Aspek kedua adalah kapasitas kewirausahaan, yang meliputi motivasi, keterampilan teknis, kemampuan inovasi, serta pengalaman masyarakat dalam mengelola usaha secara berkelanjutan (Suansri, 2003). Aspek ini menjadi penting karena pengembangan desa wisata menuntut pelaku usaha lokal untuk mampu menawarkan produk dan layanan yang menarik serta kompetitif. Aspek ketiga adalah dukungan kelembagaan, terutama peran pemerintah desa dan BUMDes dalam menyediakan pelatihan, pendampingan, serta fasilitas pendukung yang diperlukan oleh masyarakat (Suansri, 2003). Ketiga aspek ini saling terkait dan menentukan sejauh mana masyarakat dapat terlibat secara aktif dan efektif dalam pengembangan desa wisata.

Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa kesiapan masyarakat dalam mengembangkan desa wisata kerap tidak sejalan dengan potensi wisata yang dimiliki. Banyak desa dengan kekayaan alam dan budaya yang kuat justru belum mampu memaksimalkan peluang ekonomi wisata karena keterbatasan literasi

keuangan, akses modal, dan kemampuan menjalankan usaha secara berkelanjutan. Ermawati (Ermawati & Pujiyanto, 2022) menemukan bahwa pelaku UMKM desa wisata sering memiliki motivasi tinggi, tetapi terkendala dalam pembiayaan dan manajemen usaha. Penelitian Kurniawati (Kurniawati & Utami, 2025) juga mencatat bahwa rendahnya literasi keuangan berpengaruh langsung terhadap kemampuan masyarakat mempertahankan dan mengembangkan usaha wisata. Selain itu, kelembagaan desa sering kali belum dapat menjalankan fungsi penguatan ekonomi secara optimal, sehingga program pengembangan tidak terkoordinasi dengan baik. Fenomena ini oleh Sastrayda (Sastrayuda, 2010) disebut sebagai “kesenjangan kelembagaan” dalam implementasi desa wisata.

Dalam praktiknya, kesenjangan tersebut tercermin dalam berbagai bentuk. Masyarakat sering kali antusias ketika peluang wisata mulai diperkenalkan, tetapi kebingungan ketika diminta mengelola usaha secara profesional, menyiapkan produk layak jual, atau mempertahankan kualitas layanan wisata. Banyak desa menghadapi situasi di mana masyarakat mampu memulai usaha, tetapi tidak mampu mempertahankannya karena pengelolaan keuangan yang lemah, pemasaran yang tidak efektif, dan ketiadaan pendampingan. Di beberapa kasus, usaha kecil yang dibentuk untuk mendukung pariwisata justru tidak beroperasi secara konsisten karena kurangnya modal lanjutan, kesenjangan keterampilan teknis, atau terbatasnya jaringan distribusi (Trupp et al., 2025). Pada tingkat kelembagaan, dukungan seperti pelatihan, penyediaan modal, dan pembinaan usaha sering tidak berjalan berkelanjutan, sehingga masyarakat merasa berjalan sendiri tanpa arahan yang jelas. Fenomena ini menunjukkan bahwa potensi wisata yang besar tidak selalu sejalan dengan kesiapan masyarakat dalam mengelola peluang tersebut.

Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan potensi wisata tidak cukup menjamin keberhasilan pengembangan desa wisata jika tidak didukung oleh kesiapan finansial, kapasitas kewirausahaan, dan kekuatan kelembagaan masyarakat. Hal ini relevan terutama di desa-desa yang masih berada dalam tahap awal pengembangan pariwisata, di mana masyarakat harus menghadapi berbagai tuntutan baru seperti pelayanan wisata, pengelolaan usaha yang lebih profesional, kemampuan menjalankan inovasi produk, serta mengakses sumber pendanaan yang lebih variatif. Dengan demikian, kesiapan masyarakat menjadi salah satu faktor kunci yang menentukan apakah desa wisata dapat berkembang secara berkelanjutan atau justru terhenti pada tahap perencanaan.

Situasi serupa juga terlihat di Desa Mata Air, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, yang telah menetapkan arah pembangunan pariwisata melalui penyusunan Masterplan Pariwisata Desa Mata Air (2024). Masterplan tersebut menegaskan peran strategis masyarakat sebagai penggerak utama UMKM, penyedia layanan wisata, sekaligus pengelola atraksi desa. Meskipun desa memiliki potensi ekonomi yang cukup kuat seperti sumber daya alam yang indah dan tersedianya produk unggulan UMKM, namun kesiapan masyarakat tidak serta-merta memadai untuk menopang pengembangan desa wisata. Masyarakat masih mengandalkan modal pribadi, menghadapi keterbatasan literasi keuangan, minim pengalaman usaha, serta kurang mendapatkan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan sektor pariwisata. Dari sisi kelembagaan, BUMDes

yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi desa masih berada dalam tahap penguatan internal dan belum menjalankan peran pemberdayaan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan dalam Masterplan dan kapasitas masyarakat di lapangan.

Berdasarkan *gap* tersebut, pembahasan mengenai kesiapan masyarakat Desa Mata Air menjadi penting untuk dilakukan, khususnya dalam tiga aspek utama: kesiapan finansial, kapasitas kewirausahaan, dan dukungan kelembagaan. Analisis yang komprehensif terhadap ketiga aspek ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi aktual masyarakat dan menjadi dasar bagi penyusunan strategi pengembangan desa wisata yang lebih efektif, berkelanjutan, serta berakar pada kekuatan komunitas lokal.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Kesiapan Finansial (*Financial Readiness*)

Teori kesiapan finansial (*financial readiness*) dikembangkan oleh Atkinson dan Messy (2012) melalui konsep *financial capability*, yang menjelaskan bahwa kapasitas finansial individu maupun kelompok masyarakat ditentukan oleh tiga pilar utama: literasi keuangan, perilaku finansial, dan akses terhadap sumber daya finansial (Atkinson & Messy, 2012). Literasi keuangan mencakup pemahaman terhadap konsep dasar seperti tabungan, kredit, investasi, dan kemampuan mengambil keputusan keuangan secara rasional, sedangkan perilaku finansial merujuk pada kebiasaan dalam mengelola uang, mencatat transaksi, menabung, dan mengendalikan pengeluaran. Akses terhadap lembaga keuangan formal, produk keuangan yang terjangkau, serta pembiayaan usaha mikro menjadi faktor pendukung penting bagi kemampuan masyarakat mengelola keuangan secara mandiri (Atkinson & Messy, 2012).

Kesiapan finansial bagi pelaku UMKM menjadi faktor utama bagi keberlangsungan usaha dan kemandirian ekonomi masyarakat. Literasi keuangan yang baik membantu pelaku UMKM dalam mengelola modal, membuat pencatatan sederhana, dan mengambil keputusan bisnis yang efisien, sedangkan perilaku finansial yang disiplin mendorong kemampuan menjaga stabilitas kas usaha. Sebaliknya, rendahnya literasi keuangan sering menyebabkan pengelolaan keuangan tidak efisien, seperti penggunaan modal untuk konsumsi pribadi (Indriani & Rahman, 2024). Akses terhadap lembaga keuangan formal seperti BUMDes, koperasi, atau bank mikro juga menentukan sejauh mana pelaku UMKM memperoleh pembiayaan untuk pengembangan usaha (Suansri, 2003).

Modal usaha menjadi elemen kunci dalam kesiapan finansial karena berfungsi sebagai sumber daya utama untuk memulai dan memperluas usaha. Modal dapat berasal dari sumber internal seperti tabungan pribadi maupun eksternal seperti pinjaman atau investasi (Mankiw, 2011). Kecukupan modal berpengaruh langsung terhadap kemampuan pelaku usaha dalam mempertahankan operasional, meningkatkan kapasitas produksi, dan memperluas pasar (Mankiw, 2011). Dalam penelitian ini, kesiapan finansial pelaku UMKM di Desa Mata Air mencakup literasi keuangan, perilaku finansial, dan akses terhadap sumber dana menjadi modal penting untuk mendorong kemandirian ekonomi lokal serta keberhasilan implementasi Masterplan Pariwisata Desa berbasis UMKM.

Kapasitas Kewirausahaan (*Entrepreneurial Capacity*)

Kapasitas kewirausahaan (*entrepreneurial capacity*) menggambarkan kemampuan individu atau kelompok dalam mengidentifikasi peluang, mengelola sumber daya, dan menciptakan nilai ekonomi secara mandiri (Kuratko, 2024). *Entrepreneurial Readiness Model* menekankan bahwa kesiapan berwirausaha dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu motivasi, keterampilan, pengalaman, dan dukungan sosial (Mat et al., 2015). Motivasi menjadi pendorong internal untuk memulai dan mengembangkan usaha, keterampilan mencakup kemampuan teknis dan manajerial, pengalaman usaha berfungsi sebagai pembelajaran praktis terhadap risiko dan strategi bisnis, sementara dukungan sosial memperkuat jejaring usaha dan kepercayaan diri pelaku usaha. Keempat faktor tersebut saling berinteraksi dan membentuk kapasitas kewirausahaan yang menentukan keberhasilan individu dalam mengelola usaha secara berkelanjutan.

Dalam pengembangan desa wisata, kapasitas kewirausahaan masyarakat menjadi kunci dalam memperkuat ekonomi lokal berbasis partisipasi (*community-based entrepreneurship*). *Community-based entrepreneurship* menekankan bahwasanya kegiatan wirausaha di tingkat desa tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan keberdayaan komunitas (Cañizares & Canalejo, 2014). Masyarakat dengan motivasi tinggi, keterampilan memadai, pengalaman usaha, serta dukungan sosial yang kuat akan lebih adaptif terhadap peluang ekonomi wisata dan mampu berinovasi dalam mengelola potensi lokal. Dengan demikian, peningkatan kapasitas kewirausahaan di desa wisata seperti Desa Mata Air menjadi langkah strategis untuk menciptakan masyarakat mandiri, kreatif, dan berdaya saing dalam mendukung implementasi Masterplan Desa Wisata berbasis masyarakat.

Pemberdayaan Ekonomi Lokal dan Pariwisata Desa

Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (*Community-Based Tourism*) menjadi salah satu strategi efektif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal. CBT menekankan bahwa masyarakat lokal harus berperan aktif sebagai pelaku utama dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan hasil kegiatan wisata. Melalui partisipasi langsung, masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek pembangunan pariwisata. Model ini berorientasi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha mikro, dan peningkatan pendapatan rumah tangga. Berbagai studi menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata yang berbasis pada potensi lokal mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat identitas budaya, dan menciptakan diversifikasi ekonomi di luar sektor pertanian tradisional. Pantiyasa (Pantiyasa, 2019) menyebutkan bahwa Strategi di Desa Bedulu, termasuk evaluasi persepsi wisatawan dan biro perjalanan, menunjukkan bahwa pengelolaan yang baik meningkatkan kepuasan wisatawan, yang pada gilirannya mendorong konsumsi produk lokal. Ini sejalan dengan nilai tambah CBT yang mendorong keberlanjutan usaha tradisional, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan nilai tambah produk lokal sehingga pariwisata yang berakar pada masyarakat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang memperkuat kemandirian desa.

Di tingkat kelembagaan desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peran strategis sebagai motor penggerak ekonomi lokal dan pengelola utama potensi wisata. BUMDes berfungsi sebagai wadah ekonomi kolektif yang menyalurkan modal, mengelola aset desa, serta mengembangkan unit usaha produktif di bidang jasa wisata, kuliner, homestay, dan kerajinan. Keberadaan BUMDes membantu menghubungkan antara potensi wisata dengan aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga manfaat pariwisata dapat dirasakan secara merata oleh warga desa (Kemendes PDTT, 2021). Melalui kerja sama dengan pelaku UMKM, karang taruna, dan kelompok masyarakat, BUMDes berperan dalam memperkuat jejaring usaha lokal serta menciptakan model ekonomi desa yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan BUMDes dan peningkatan partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam memastikan agar pengembangan desa wisata benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologis untuk menangkap pengalaman, persepsi, dan makna (Sweatman & Robins, 2020) yang dimiliki pelaku terkait kesiapan finansial dan kapasitas kewirausahaan pada implementasi Masterplan (Strauss & Corbin, 1998) dan Desa Wisata Desa Mata Air. Pendekatan fenomenologis dipilih agar data tidak sekadar faktual, melainkan merekam secara subjektif dan praktik sehari-hari di lapangan. Lokasi penelitian berada di Desa Mata Air, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur yang dipilih secara purposif karena telah memiliki Masterplan Desa Wisata (dokumen perencanaan) dan keberadaan BUMDes yang relevan sebagai aktor kelembagaan. Pengumpulan data lapangan dilaksanakan selama masa kunjungan lapangan yang dimulai pada tanggal 1 Agustus 2025 hingga 31 Oktober 2025.

Informan dipilih secara purposive untuk memastikan variasi perspektif: kepala desa (kebijakan), pengurus BUMDes (kelembagaan), tokoh masyarakat/ketua karang taruna (organisasi sosial), serta pelaku UMKM yang dianggap memahami kondisi sosial-ekonomi dan dinamika pengembangan desa wisata. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama. Pertama, wawancara semi-terstruktur yang disusun berdasarkan tiga bahasan dalam penelitian ini, yakni kesiapan finansial, kapasitas kewirausahaan, dan dukungan kelembagaan. Kedua, observasi lapangan dilakukan secara partisipatif pada lokasi usaha UMKM, fasilitas pendukung wisata, dan aktivitas pelayanan. Ketiga, analisis dokumen dilakukan terhadap Masterplan Desa Wisata, laporan BUMDes, dan laporan kegiatan desa yang digunakan untuk memvalidasi temuan lapangan. Melalui ketiga teknik tersebut diperoleh data mengenai pengalaman permodalan, praktik keuangan, kualitas fasilitas wisata, operasional BUMDes, serta arah kebijakan desa dalam pengembangan pariwisata. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologis untuk menggali pengalaman dan persepsi masyarakat mengenai kesiapan finansial dan kapasitas kewirausahaan dalam implementasi Masterplan Desa Wisata Desa Mata Air. Lokasi penelitian berada di Desa Mata Air, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, yang dipilih secara purposif karena desa ini telah

memiliki Masterplan Desa Wisata berbasis masyarakat dan memiliki BUMDes aktif sebagai lembaga penggerak ekonomi lokal. Informan penelitian terdiri dari Kepala Desa, pengurus BUMDes, tokoh masyarakat atau ketua karang taruna, serta pelaku UMKM, yang dianggap memahami kondisi sosial-ekonomi dan dinamika pengembangan desa wisata.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles & Huberman (Miles et al., 2014) yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, seluruh transkripsi wawancara dan catatan lapangan disederhanakan melalui pengkodean awal berdasarkan topik-topik utama seperti sumber modal, literasi dan pencatatan keuangan, pengalaman pelatihan, serta peran kelembagaan desa. Tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun matriks informan dan tabel ringkasan temuan untuk memetakan pola penting. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan melalui analisis tematik yang disertai verifikasi berkelanjutan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen desa sehingga diperoleh kategori akhir terkait kesiapan finansial, kapasitas kewirausahaan, dan kualitas dukungan kelembagaan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, serta member checking kepada informan utama untuk memastikan akurasi interpretasi dan konsistensi temuan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Mata Air

Desa Mata Air merupakan salah satu desa di Kecamatan Kaibun, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Desa Mata Air memiliki penduduk sejumlah 864 jiwa dan luas wilayah 2.305,47 hektare. Secara geografis, Desa Mata Air memiliki kontur bergelombang yang menghasilkan variasi daya dukung lahan, namun sebagian besar kawasan dikategorikan “Terlampau Tinggi” dan “Terlampau Sangat Tinggi” sehingga layak untuk pengembangan pariwisata alam. Sarana-prasarana dasar di desa relatif tersedia, seperti jaringan listrik PLN, jaringan telekomunikasi, sekolah TK–SMP, Posyandu, dan Puskesmas Pembantu. Beberapa fasilitas seperti layanan air bersih dan kondisi bangunan kesehatan masih bisa dikatakan cukup terbatas. Kegiatan ekonomi masyarakat didominasi oleh pertanian, perkebunan kelapa sawit, peternakan, serta perdagangan kecil, dengan keberadaan 9 toko kelontong dan berbagai UMKM seperti warung makan, jasa jahit, dan bengkel sebagai sumber penghidupan tambahan.

Dari sisi kelembagaan, desa memiliki struktur formal seperti Pemerintah Desa, Lembaga Adat, PKK, Karang Taruna, dan BPD, serta BUMDes yang mengelola unit usaha dasar seperti penyewaan tenda desa, meskipun fungsi pemberdayaannya masih terbatas dan belum berjalan optimal. Dalam Masterplan Desa Wisata Desa Mata Air Tahun 2024, kawasan sumber mata air, kolam tanah atau embung, dan area hutan rakyat diidentifikasi sebagai potensi utama untuk pengembangan ekowisata. Desa ini juga memiliki nilai ekologis penting, ditunjukkan dengan pengakuan World Bank sebagai desa dengan kawasan hutan rendah karbon. Dengan potensi alam yang kuat dan struktur sosial-ekonomi yang aktif, Desa Mata Air memiliki peluang besar untuk berkembang sebagai desa wisata berbasis komunitas.

Hasil Penelitian

a. Kesiapan Finansial Masyarakat Desa Mata Air

Kesiapan finansial masyarakat Desa Mata Air merupakan aspek penting dalam mendukung implementasi Masterplan Desa Wisata karena masyarakat menjadi pelaku utama dalam model pariwisata berbasis komunitas. Kesiapan finansial tidak hanya mencakup ketersediaan modal, tetapi juga mencakup kemampuan mengelola keuangan, memanfaatkan akses pembiayaan, serta menjaga keberlanjutan usaha yang mendukung kegiatan wisata. Masyarakat yang memiliki kesiapan finansial yang baik akan lebih mampu merespons peluang ekonomi wisata, memulai usaha baru, maupun mengembangkan usaha yang sudah ada. Sebaliknya, keterbatasan modal, lemahnya pencatatan keuangan, dan ketidakmampuan mengakses pembiayaan formal dapat menghambat keterlibatan masyarakat dalam pengembangan destinasi.

Berdasarkan dokumen Masterplan, struktur ekonomi masyarakat Desa Mata Air ditopang oleh perdagangan kecil, pertanian, usaha rumah tangga, dan berbagai UMKM yang tersebar di seluruh dusun, sehingga terdapat landasan ekonomi yang potensial untuk mendukung desa wisata. Selain itu, dalam dokumen Masterplan juga mencatat adanya program pemberdayaan dan pelatihan ekonomi, meskipun pelaksanaannya masih terbatas dan belum menjangkau seluruh pelaku usaha, sehingga penguatan kesiapan finansial tetap menjadi kebutuhan mendesak.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa modal usaha masyarakat sebagian besar berasal dari dana pribadi, tabungan keluarga, atau patungan dengan kerabat. Para pelaku usaha kuliner, toko pakaian, maupun toko sembako menjelaskan bahwa mereka memulai usaha tanpa bantuan modal eksternal. Seluruh informan UMKM juga menegaskan bahwa mereka tidak pernah memperoleh pembiayaan dari BUMDes ataupun pemerintah desa. Informasi ini diperkuat oleh pihak BUMDes yang menyampaikan bahwa lembaganya belum menyediakan fasilitas pembiayaan karena masih berfokus pada unit usaha dasar seperti penyewaan tenda, kursi, dan pengelolaan besi tua.

Dalam pengelolaan keuangan, mayoritas pelaku usaha mengaku melakukan pencatatan secara sederhana atau bahkan hanya mengandalkan ingatan. Pemerintah desa juga mengakui bahwa masyarakat umumnya belum terbiasa menyusun pembukuan usaha secara formal, serta hanya memahami konsep dasar seperti untung dan rugi tanpa pemisahan antara keuangan usaha dan keuangan rumah tangga. Beberapa pelaku usaha menyisihkan sebatas sebagian pendapatan untuk tabungan, namun belum memiliki sistem pengelolaan keuangan yang lebih terstruktur. Sementara itu, informan dari Karang Taruna melihat bahwa sebagian masyarakat sebenarnya memiliki kemampuan finansial awal yang memadai, tetapi akses terhadap pembiayaan formal masih menjadi kendala bagi mereka yang ingin mengembangkan usaha lebih lanjut.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Mata Air telah memiliki tingkat kemandirian finansial pada fase awal yang ditunjukkan oleh kemampuan memulai usaha menggunakan modal mandiri. Namun demikian, kesiapan finansial tersebut belum disertai dengan literasi keuangan yang memadai, sistem pencatatan keuangan yang tertib, serta akses pembiayaan usaha yang inklusif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas

pengelolaan keuangan, program literasi finansial, dan skema pendanaan yang lebih mudah diakses untuk memperkuat kesiapan masyarakat dalam mendukung pengembangan desa wisata secara berkelanjutan.

b. Kapasitas Kewirausahaan Masyarakat Desa Mata Air

Kapasitas kewirausahaan merupakan kemampuan masyarakat untuk menciptakan, mengelola, dan mengembangkan usaha secara berkelanjutan melalui motivasi, keterampilan teknis, inovasi, dan pengalaman usaha. Pada pengembangan desa wisata berbasis komunitas, kapasitas kewirausahaan menjadi elemen krusial karena masyarakat tidak hanya dituntut mampu menyediakan produk dan layanan bagi wisatawan, tetapi juga harus mampu mengelola usaha secara profesional agar dapat bertahan dalam persaingan dan memenuhi standar layanan wisata. Dengan demikian, kesiapan kewirausahaan masyarakat akan menentukan sejauh mana mereka dapat mengambil peran aktif dalam menggerakkan ekonomi wisata dan memastikan manfaat pariwisata kembali kepada komunitas lokal.

Pentingnya aspek ini juga tercermin dalam Masterplan Desa Wisata Desa Mata Air Tahun 2024 yang menempatkan penguatan kewirausahaan sebagai salah satu fondasi utama dalam mewujudkan desa wisata berbasis masyarakat. Masterplan tersebut mengidentifikasi berbagai peluang usaha yang potensial dikembangkan, seperti kuliner khas desa, kerajinan tangan, *homestay*, jasa penyewaan alat wisata, hingga produk lokal berbasis pertanian dan perkebunan. Meskipun demikian, dokumen perencanaan tersebut juga menegaskan bahwa masyarakat memerlukan peningkatan kapasitas teknis dan manajerial agar mampu mengelola usaha tersebut secara efektif dan berkelanjutan.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa motivasi masyarakat untuk berwirausaha tergolong tinggi. Para pelaku UMKM yang diwawancarai umumnya memiliki tekad kuat untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan memanfaatkan peluang ekonomi yang ada di lingkungan sekitar. Beberapa di antaranya telah melakukan inovasi sederhana seperti menambah variasi produk atau menyesuaikan barang dagangan dengan kebutuhan pasar lokal. Contoh lainnya ialah beberapa pelaku UMKM telah memiliki NIB dan Sertifikat Halal untuk produknya sebagai salah satu wujud kesiapan menyambut Desa Mata Air sebagai desa wisata. Beberapa contoh tersebut mencerminkan adanya kesiapan psikologis dan motivasi intrinsik sebagai modal awal bagi pengembangan usaha berbasis wisata. Namun demikian, kapasitas teknis dan manajerial masyarakat masih terbatas. Mayoritas pelaku UMKM mengaku belum pernah mengikuti pelatihan kewirausahaan, pelatihan manajemen usaha, maupun pelatihan pendukung desa wisata. Pengurus BUMDes juga menyampaikan bahwa mereka belum memiliki program pendampingan UMKM karena masih berfokus pada pengelolaan unit usaha internal yang skalanya kecil. Informan Karang Taruna menambahkan bahwa keterampilan masyarakat dalam pemasaran, pelayanan, dan produksi masih perlu diperkuat agar mampu bersaing dan memenuhi kebutuhan wisatawan ketika desa mulai berkembang sebagai destinasi.

Berdasarkan integrasi temuan dokumen dan hasil wawancara, kapasitas kewirausahaan masyarakat Desa Mata Air dapat dikatakan kuat pada aspek motivasi dan kesiapan psikologis, namun masih lemah pada aspek keterampilan

teknis, inovasi lanjutan, dan manajemen usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki potensi besar untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi wisata, tetapi memerlukan dukungan berupa pelatihan kewirausahaan, peningkatan keterampilan teknis, dan pendampingan usaha yang berkelanjutan. Penguatan kapasitas kewirausahaan menjadi langkah penting agar masyarakat dapat berperan sebagai pelaku utama, bukan sekadar partisipan pasif, dalam pengembangan Desa Mata Air sebagai desa wisata berbasis komunitas.

c. Dukungan Kelembagaan Desa (Pemerintah Desa dan BUMDes)

Dukungan kelembagaan desa merupakan pilar penting dalam pengembangan desa wisata, karena lembaga desa berperan sebagai pengarah, penggerak, dan penjamin keberlanjutan kegiatan pembangunan berbasis komunitas. Dukungan kelembagaan mencakup penyediaan regulasi, koordinasi antar aktor, pendampingan usaha, serta fasilitasi akses terhadap pelatihan dan pembiayaan. Kelembagaan yang kuat memungkinkan masyarakat memperoleh ruang partisipasi yang jelas sekaligus mendapatkan dukungan struktural yang diperlukan untuk mengembangkan usaha wisata secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan prinsip *Community-Based Tourism* (CBT), yang menekankan bahwa keberhasilan destinasi sangat dipengaruhi oleh kapasitas organisasi lokal dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif.

Dalam Masterplan Desa Wisata Desa Mata Air Tahun 2024, dukungan kelembagaan memperoleh perhatian khusus. Masterplan menetapkan Pemerintah Desa dan BUMDes sebagai aktor kunci yang bertanggung jawab dalam pengembangan unit usaha wisata, pemberdayaan UMKM, penguatan kapasitas masyarakat, serta koordinasi kemitraan eksternal. Dokumen tersebut menempatkan BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi lokal yang idealnya berfungsi sebagai penyedia layanan pembiayaan, pendampingan usaha, serta pengelola potensi ekonomi berbasis pariwisata. Sementara itu, Pemerintah Desa diarahkan untuk menjadi penguat kapasitas masyarakat, penghubung dengan pihak eksternal, dan fasilitator regulasi desa wisata.

Dalam pengembangan desa wisata berbasis masyarakat, dukungan kelembagaan desa menjadi sangat penting karena tanpa struktur formal yang kuat, masyarakat sering menghadapi kendala dalam mengakses pelatihan, permodalan, maupun pendampingan yang sistematis. Lembaga desa seperti pemerintah desa, BUMDes, Karang Taruna, dan PKK memiliki potensi peran yang beragam dalam mendukung terciptanya ekosistem wisata: mulai dari penyediaan sarana prasarana dasar, pelatihan kewirausahaan, pengelolaan atraksi, promosi desa, hingga pengembangan jejaring kemitraan. Oleh karena itu, kapasitas kelembagaan desa sangat menentukan apakah potensi wisata dapat dikelola menjadi produk wisata yang berkelanjutan atau hanya berhenti pada konsep perencanaan.

Hasil wawancara dengan Pemerintah Desa menunjukkan bahwa beberapa pelatihan dan kegiatan pemberdayaan memang pernah dilaksanakan, seperti pelatihan pengolahan makanan dan program peningkatan keterampilan masyarakat. Namun, kegiatan tersebut belum berjalan rutin dan tidak menjangkau seluruh pelaku usaha. Pemerintah Desa juga mengakui bahwa mereka belum memiliki skema bantuan modal khusus karena keterbatasan anggaran, sehingga dukungan

yang diberikan lebih banyak bersifat administratif, seperti fasilitasi kerja sama dengan lembaga luar desa dan pemberian rekomendasi usaha.

Di sisi lain, hasil wawancara dengan pengurus BUMDes menunjukkan bahwa lembaga ini masih berada dalam tahap awal pengembangan. Unit usaha yang dikelola masih terbatas pada penyewaan tenda, kursi, dan pengelolaan besi tua, sehingga belum mampu menjalankan fungsi strategis sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi masyarakat. BUMDes juga menyatakan bahwa mereka saat ini masih fokus pada penataan administrasi dan penguatan internal, sehingga belum dapat menyediakan layanan pembiayaan, pendampingan UMKM, atau program pelatihan kewirausahaan.

Selain dukungan internal desa, wawancara dengan tokoh Karang Taruna mengungkapkan bahwa beberapa pelatihan dari lembaga eksternal memang pernah diikuti oleh warga, tetapi sifatnya tidak berkelanjutan, tidak terintegrasi dengan Masterplan, dan tidak diarahkan untuk mendukung desa wisata secara langsung. Informan juga menekankan perlunya kolaborasi kelembagaan yang lebih kuat untuk membantu masyarakat mempersiapkan diri menghadapi kebutuhan wisatawan, terutama dalam hal pelayanan, pemasaran, dan pengelolaan produk wisata.

Secara keseluruhan, dukungan kelembagaan Desa Mata Air dapat dikatakan cukup tersedia namun belum optimal. Pemerintah Desa telah menunjukkan komitmen melalui beberapa kegiatan pelatihan, tetapi belum konsisten dan belum terarah penuh pada pengembangan desa wisata. BUMDes memiliki posisi strategis namun masih perlu memperkuat kapasitas internal sebelum dapat menjalankan peran pemberdayaan secara efektif. Berdasarkan temuan tersebut, pengembangan desa wisata ke depan memerlukan strategi penguatan kelembagaan yang mencakup peningkatan kapasitas BUMDes, konsistensi pelatihan bagi UMKM, serta pembangunan kemitraan berkelanjutan dengan lembaga pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil.

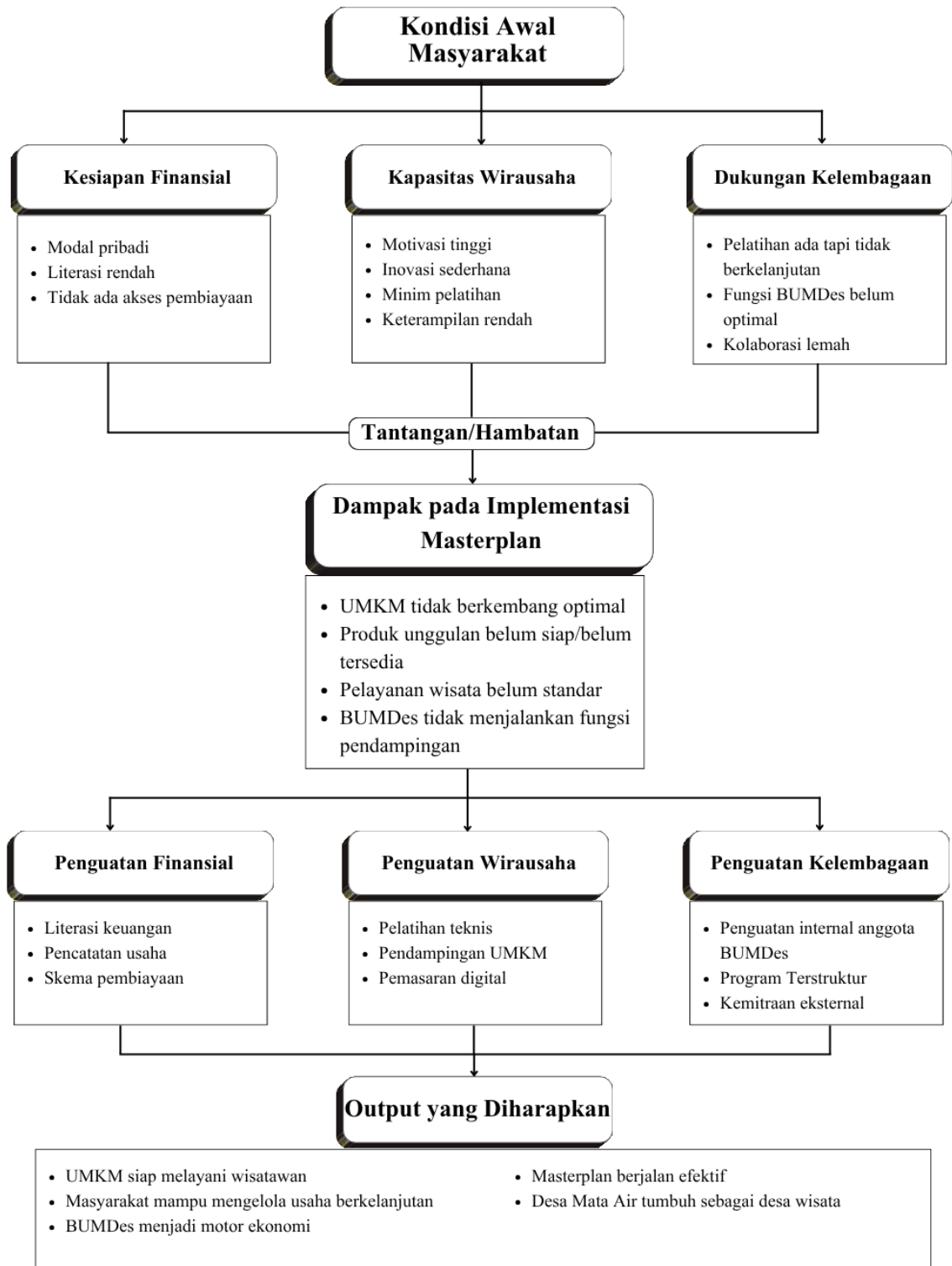
Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kesiapan masyarakat Desa Mata Air dalam mendukung pengembangan desa wisata berada pada tahap parsial, di mana beberapa aspek telah menunjukkan kesiapan yang kuat, sementara aspek lainnya masih membutuhkan penguatan. Secara empiris, masyarakat memiliki motivasi berwirausaha yang tinggi dan mampu memulai usaha menggunakan modal pribadi, sebagaimana tampak pada berbagai pelaku UMKM yang membiayai sendiri usaha mereka tanpa dukungan pembiayaan formal. Kondisi ini menunjukkan adanya initial entrepreneurial drive, yang dalam Entrepreneurial Readiness Model (Wach, 2015) disebut sebagai kesiapan internal yang bersumber dari motivasi dan kepercayaan diri pelaku usaha. Namun, hasil ini juga mengindikasikan bahwa kesiapan tersebut baru menyentuh aspek psikologis, belum sepenuhnya berkembang pada aspek teknis maupun kelembagaan.

Untuk memperjelas posisi kesiapan masyarakat Desa Mata Air dalam kerangka pengembangan desa wisata berbasis komunitas, penelitian ini melengkapi analisis dengan sebuah diagram alur Gambar 1. yang memetakan hubungan antara kondisi awal masyarakat, tantangan yang dihadapi, serta kebutuhan penguatan pada tiga aspek utama: kesiapan finansial, kapasitas

kewirausahaan, dan dukungan kelembagaan. Gambar 1. membantu menggambarkan secara sistematis bagaimana setiap aspek berkontribusi terhadap tingkat kesiapan masyarakat, sekaligus menunjukkan area yang masih lemah dan membutuhkan intervensi.

Selanjutnya, ditinjau menggunakan teori *Financial Capability* dari (Atkinson & Messy, 2012). masyarakat Desa Mata Air baru memenuhi satu dari tiga pilar utama, yaitu *financial resources*, yakni kemampuan menyediakan modal awal secara mandiri. Sementara dua pilar lainnya, yaitu literasi keuangan dan perilaku finansial, masih rendah. Hal ini terlihat dari minimnya pencatatan keuangan, kurangnya pemisahan antara keuangan usaha dan keuangan pribadi, serta ketiadaan akses terhadap lembaga pembiayaan formal. Dengan demikian, kesiapan finansial masyarakat dapat dikatakan belum komprehensif karena masih berfokus pada kemampuan menyediakan modal awal, tetapi belum pada aspek pengelolaan dan pengembangan modal, yang esensial dalam konteks UMKM dan pariwisata desa.



Gambar 1. Diagram Alur Kesiapan Masyarakat dalam Implementasi Masterplan Desa Wisata (Sumber: Data diolah, 2025)

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan temuan studi-studi terdahulu yang menunjukkan bahwa pelaku UMKM di pedesaan sering memiliki motivasi tinggi namun menghadapi hambatan pada literasi finansial, akses kredit, dan kemampuan manajerial yang telah diteliti sebelumnya oleh Ermawati (Ermawati & Pujiyanto, 2022) serta Kurniawati (Kurniawati & Utami, 2025).

Lalu, kesiapan masyarakat Desa Mata Air dalam pengembangan desa wisata menunjukkan pola yang tidak seragam di antara berbagai aspek. Dari sisi psikologis, masyarakat memiliki motivasi dan kemauan berusaha yang tinggi, tercermin dari keinginan kuat untuk meningkatkan pendapatan keluarga serta inisiatif memulai usaha secara mandiri. Motivasi ini menjadi modal awal penting bagi keterlibatan masyarakat dalam aktivitas wisata. Namun, motivasi tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan kompetensi teknis yang memadai. Sebagian besar pelaku usaha masih melakukan pencatatan sederhana, belum memahami manajemen keuangan dasar, dan belum mampu menciptakan inovasi produk yang lebih berorientasi pada pasar wisata. Dalam hal operasional usaha, masyarakat masih terbatas pada pola usaha subsisten, yakni menjual produk yang tersedia, bukan produk yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesiapan dasar, tetapi belum pada tahap siap bersaing atau siap melayani pasar wisata secara profesional.

Keterbatasan tersebut makin terlihat ketika dikaitkan dengan dukungan kelembagaan di desa. Pemerintah desa memang pernah melaksanakan beberapa pelatihan, tetapi sifatnya belum rutin dan belum menyentuh keseluruhan pelaku UMKM. BUMDes, yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi desa, masih berfokus pada usaha internal dan belum memiliki program pendampingan, pembiayaan, atau pelatihan UMKM. Akibatnya, masyarakat tidak memiliki rujukan kelembagaan yang dapat mendukung peningkatan kemampuan teknis maupun pengembangan usaha. Kondisi lapangan menunjukkan bahwa masyarakat bergerak sendiri tanpa sistem pendampingan atau struktur dukungan yang kuat, sehingga peluang peningkatan kapasitas kewirausahaan tidak optimal.

Scheyvens (Scheyvens, 1999) menjelaskan bahwa keberhasilan *Community-Based Tourism* bergantung pada kombinasi antara motivasi masyarakat, kapasitas teknis-kewirausahaan, dan dukungan kelembagaan. Temuan di Desa Mata Air menunjukkan bahwa masyarakat cukup kuat pada aspek motivasional, namun masih lemah pada keterampilan teknis dan tidak didukung oleh kelembagaan yang memadai. Pola ini konsisten dengan temuan penelitian Ermawati dan Kurniawati, yang mengungkapkan bahwa pelaku UMKM di desa umumnya memiliki dorongan berusaha yang tinggi tetapi terhambat oleh rendahnya literasi finansial, akses kredit, dan kemampuan manajerial. Dengan demikian, kondisi Desa Mata Air sejalan dengan kecenderungan umum di desa-desa lain: adanya potensi besar dari sisi masyarakat, namun belum ditopang oleh pengetahuan, keterampilan, dan dukungan struktural yang dibutuhkan untuk mengembangkan desa wisata secara berkelanjutan.

Berdasarkan pembahasan di atas, kesiapan masyarakat Desa Mata Air dapat dikategorikan sebagai kesiapan parsial. Kesiapan parsial diartikan masyarakat sudah memiliki motivasi dan modal awal yang sesuai dengan indikator *entrepreneurial intent* (Molaei, 2014) namun belum memenuhi aspek literasi

finansial dan kemampuan manajerial sebagaimana disyaratkan dalam teori *financial capability*. Kondisi ini menunjukkan kesesuaian temuan lapangan dengan penelitian-penelitian terdahulu terkait tantangan UMKM desa, sekaligus menguatkan bahwa pengembangan desa wisata tidak cukup hanya mengandalkan motivasi masyarakat, tetapi memerlukan intervensi sistemik melalui peningkatan kapasitas finansial, pelatihan kewirausahaan, serta penguatan lembaga desa seperti BUMDes untuk menopang keberlanjutan pembangunan pariwisata berbasis komunitas.

E. PENUTUP

Penelitian ini menjelaskan bahwa kesiapan masyarakat Desa Mata Air dalam mendukung implementasi Masterplan Desa Wisata berada pada tingkat parsial. Masyarakat memiliki kemandirian finansial awal melalui penggunaan modal pribadi, namun kemampuan pengelolaan keuangan, literasi finansial, dan akses pembiayaan formal masih terbatas. Kapasitas kewirausahaan masyarakat juga menunjukkan kombinasi antara motivasi yang tinggi dengan keterampilan teknis dan manajerial yang masih lemah akibat minimnya pelatihan dan pendampingan. Dari sisi kelembagaan, Pemerintah Desa dan BUMDes telah berupaya memberikan dukungan, tetapi program yang ada belum konsisten dan belum mampu menjawab kebutuhan penguatan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Dengan demikian, kesiapan masyarakat terletak pada kuatnya dorongan berusaha, tetapi belum ditopang oleh kapasitas finansial, kewirausahaan, dan kelembagaan yang memadai untuk mengoptimalkan pengembangan desa wisata berbasis komunitas.

Selanjutnya, peneliti menyarankan agar literasi dan pengelolaan keuangan masyarakat diperkuat melalui pelatihan yang lebih terarah dan berkelanjutan, serta didukung oleh skema pembiayaan mikro yang mudah diakses untuk membantu pengembangan usaha lokal. Pelatihan kewirausahaan yang sesuai dengan potensi desa seperti pengolahan produk, pemasaran, dan pelayanan wisata juga perlu diperluas guna meningkatkan keterampilan teknis pelaku UMKM. Selain itu, BUMDes perlu memperkuat kapasitas organisasi dan memperluas perannya dalam pendampingan usaha, termasuk menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah dan mitra eksternal. Seluruh langkah tersebut penting untuk diintegrasikan ke dalam implementasi Masterplan Desa Wisata agar pengembangan desa wisata sejalan dengan peningkatan kapasitas dan kemandirian ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Atkinson, A., & Messy, F. (2012). Measuring Financial Literacy: Results of the OECD/International Network on Financial Education (INFE) Pilot Study. *OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions*, 15.
- Cañizares, S., & Canalejo, C. (2014). Community-based island tourism: The case of Boa Vista in Cape Verde. *International Journal of Culture, Tourism, and Hospitality Research*, 8(2).
- Ermawati, Y., & Pujiyanto, P. (2022). Tata kelola dan manajemen keuangan kelompok umkm di desa wisata. *In Prosiding Seminar Nasional Ilmu*

- Sosial Dan Teknologi (SNISTEK)*, Vol. 4, pp. 385–392.
- Indriani, S., & Rahman, Z. D. (2024). Literasi Keuangan, Pemanfaatan QRIS dan Kinerja Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Jakarta Selatan. *JABEL: Jurnal Akuntansi, Bisnis dan Ekonomi Indonesia*, 3(2), 53–63.
- Kemendes PDTT. (2021). *BUMDes: Inovasi Pengembangan Ekonomi Desa*. Kemendes PDTT.
- Kuratko, D. F. (2024). *Entrepreneurship: Theory, process, and practice (12th ed.)*. Cengage Learning.
- Kurniawati, F., & Utami, E. (2025). Pengaruh Literasi Keuangan, Digitalisasi Keuangan, dan Modal Usaha Terhadap Keberlanjutan Umkm: Studi Kasus Umkm Kerajinan Bambu di Desa Wisata Sendari, Kecamatan Tirtoadi, Kalurahan Mlati, Kabupaten Sleman. *JURNAL SIBATIK: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 4(11), 3737–3750.
- Mankiw, G. N. (2011). *Principles Of Economics (Pengantar Ekonomi Mikro)*. Salemba Empat.
- Mat, S. C., Maat, S. ., & Mohd, N. (2015). Identifying Factors that affecting the entrepreneurial intention among engineering technology students. *2nd Global Conference on Business and Social Science*.
- Miles, M. ., Huberman, A. ., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A. Methods Sourcebook, Edition 3*. SAGE Publications.
- Molaei. (2014). The impact of entrepreneurial ideas and cognitive style on students entrepreneurial intention. *Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies*, 6(22), 140 – 162.
- Pantiyasa, I. W. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Bedulu, Blah Batuh, Gianyar). *Jurnal Ilmiah Hospitality Management*, 1(2).
- Saleh, B. (2018). *Strategi bisnis pariwisata*. Humaniora.
- Sastrayuda, G. S. (2010). *Konsep Pengembangan Kawasan Desa Wisata*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Scheyvens, R. (1999). Ecotourism and the empowerment of local communities Author links open overlay panel. *Tourism Management*, 20(2), 245–249.
- Strauss, A., & Corbin, J. (1998). *Basic qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. (2nd ed)*. SAGE Publications.
- Suansri, P. (2003). *Community Based Tourism Handbook*. REST Project.
- Sweatman, P., & Robins, N. (2020). *Green Tagging: Mobilising Bank Finance for Energy Efficiency in Real Estate (REPORT FROM THE BANK WORKING GROUP 2020)*.
- Trupp, A., Salman, A., Stephenson, M. L., Chan, L. F., & Gan, J. E. (2025). A systematic review of challenges faced by Micro and small Enterprises in Tourism Destinations: Producing solutions through resilience building and sustainable development. *Tourism Planning & Development*, 22(3).